

**FASILITAS BEBAS BEA MASUK BAGI LEAST DEVELOPED COUNTRIES DAN
MANFAATNYA BAGI INDONESIA**
*Duty Free Facility for Least Developed Countries and
Their Benefits for Indonesia*

Adrian D. Lubis

Pusat Pengkajian Kebijakan Perdagangan Internasional, Badan Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI,

Jl. M. I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat, adrian.lubis@kemendag.go.id

Naskah diterima: 14 Januari 2013

Disetujui diterbitkan: 12 November 2013

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji manfaat pemberian fasilitas bebas bea masuk bagi negara penerima yang dikelompokkan ke dalam LDC dan manfaatnya bagi Indonesia sebagai negara pemberi. Metode yang digunakan adalah Indeks Spesialisasi Perdagangan, Indeks *Intra Industry Trade*, Uji Beda dan Model Keseimbangan Umum GTAP. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa fasilitas bantuan akses pasar tersebut tidak merugikan industri nasional dan merupakan sumber alternatif untuk memperoleh bahan baku. Hal tersebut akan semakin kuat jika Indonesia memanfaatkan fleksibilitas sebagai negara berkembang yang tidak diwajibkan untuk menghapus bea masuk seluruh pos tarif yang dikenakan kepada negara-negara LDC. Namun, dalam pelaksanaannya fasilitasi tersebut harus diikuti dengan pemberlakuan surat keterangan asal yang ketat untuk meminimalkan kemungkinan penyelundupan dari negara bukan anggota LDC.

Kata kunci : Bebas Bea Masuk, Least Developed Countries, Akses Bahan Baku, Manfaat

Abstract

This study is conducted to investigate the benefits of the duty-free facility for the Least Developed Countries (LDC) as receivers and the benefits for Indonesia as a donor. The methods of analysis used in this study are Trade Specialization Index, Index of Intra Industry Trade, Differential Test and General Equilibrium Model of GTAP. The study found that the duty-free facility is not detrimental to the national industry and as an alternative source of obtaining raw materials. It will be stronger if Indonesia utilizing the flexibility as developing country with no obligation to remove all import duties charged to LDC countries. However, in practice, such kind of facilitation should be followed by the application of strict certificate of origin to minimize the possibility of smuggling from countries other than the members of the LDC.

Keywords: *Duty Free, Least Developed Countries, Access for Raw Material, Benefits*

JEL Classification : F1, F13, F17

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20 memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan yang telah disetujui salah satunya dalam pertemuan pimpinan kelompok tersebut di Seoul tahun 2011. Adapun salah satu kesepakatan dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut adalah memberikan bantuan akses pasar kepada negara paling tidak berkembang (*Least Developed Countries/ LDC*) berupa penghapusan kebijakan kuota dan tarif. Adapun kesepakatan tersebut merujuk pada Deklarasi Para Menteri di Hongkong, Desember 2005.

Usulan dalam deklarasi tersebut adalah memberikan akses pasar terhadap 97% dari total pos tarif atau volume impor negara bersangkutan terhadap impor dari negara-negara LDC. Dalam pemberian akses pasar tersebut, setiap negara yang masih tergolong negara berkembang seperti Indonesia diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaannya.

Pemberian akses pasar kepada negara-negara LDC bertujuan untuk mengurangi kemiskinan (*reducing poverty*) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*enhancing economic growth*) bagi negara LDC. Adapun negara-negara yang termasuk kedalam LDC adalah Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Chad, Congo Djibouti, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kamboja, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambik, Myanmar, Nepal, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Solomon Island, Tanzania, Togo, Uganda, dan Zambia. Kelompok negara LDC tersebut didasarkan pada pengelompokan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas negara yang diyakini sangat sulit melepaskan diri dari kemiskinan akibat rendahnya pendapatan per kapita, terbatasnya sumber daya manusia, dan kerentanan perekonomian mereka berdasarkan *Economic Vulnerability Index* (UNCTAD, 2012).

Salah satu kasus manfaat pemberian akses pasar bagi negara LDC dapat dilihat dari temuan Bouet, et al (2010). Menurut Bouet, et al (2010), pemberian akses pasar melalui kebijakan bebas bea masuk oleh negara maju disertai negara ekonomi kuat lain seperti Brazil, Cina, India, dan Rusia diperkirakan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara LDC. Sebaliknya dampak bagi negara pemberi bebas bea masuk tidak signifikan karena pangsa impor dari LDC relatif kecil.

Namun, di Indonesia masih terdapat kekhawatiran bahwa pemberian bebas bea masuk akan merugikan produsen domestik karena produk LDC merupakan produk substitusi bagi produk nasional. Hal ini disebabkan pemberian fasilitas bebas bea masuk tersebut hanya satu arah, dari Indonesia kepada negara-negara LDC, tidak timbal balik. Oleh karena itu pertimbangan utama dalam pemberian fasilitas adalah peningkatan akses pasar bagi LDC. Menyadari permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai manfaat pemberian bebas bea masuk bagi negara yang dikelompokkan ke dalam LDC tersebut bagi Indonesia, khususnya produsen domestik, dan sektor industri. Selanjutnya, berdasarkan temuan tersebut akan diusulkan rumusan pelaksanaan kebijakan tersebut yang bisa memberikan manfaat bagi Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Liberalisasi

Liberalisasi sering diidentikkan sebagai keterbukaan dalam perekonomian. Liberalisasi ekonomi/perdagangan dicirikan dengan penghapusan atau pengurangan berbagai hambatan yang terjadi dalam perdagangan antar-negara, baik hambatan berupa tarif atau non-tarif. Penghapusan/pengurangan berbagai hambatan perdagangan tersebut berangkat dari argumen/landasan teori perdagangan internasional yang menyatakan bahwa hambatan perdagangan menyebabkan distorsi bagi perekonomian sehingga sumber daya yang tersedia tidak dialokasikan secara efisien.

Penghapusan berbagai hambatan perdagangan akan meningkatkan manfaat dari perdagangan internasional yaitu memberikan akses terhadap barang yang lebih murah bagi konsumen serta meningkatkan pendapatan bagi pemilik sumber daya (*resources*) karena menurunkan biaya produksi (Salvatore, 1997).

Kerangka Teori Dampak Penurunan Tarif terhadap Kinerja Perdagangan dan Industri Nasional

Salah satu hambatan perdagangan internasional adalah hambatan tarif (Salvatore, 1997). Tarif merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan luar negeri yang paling sering digunakan yang bertujuan untuk membatasi arus perdagangan internasional. Tarif adalah suatu pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean (daerah geografis). Tarif adalah pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi yang diperdagangkan lintas batas

teritorial. Pengenaan tarif dimaksudkan untuk memproteksi produk dalam negeri. Dengan adanya tarif harga barang impor dalam mata uang nasional meningkat sehingga permintaan di pasar dalam negeri menurun dan hal tersebut mendorong produksi dalam negeri karena adanya kenaikan permintaan domestik atas barang hasil dalam negeri. Ada tiga macam jenis tarif yang biasa digunakan dalam perdagangan internasional yaitu :

1. Bea Ekspor (*export duties*) adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diangkut atau diekspor menuju negara lain.
2. Bea Transito (*transit duties*) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain.
3. Bea Impor (*import duties*) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ke dalam suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pemberian akses bebas bea masuk pada LDC akan meningkatkan kinerja perdagangan LDC namun tidak memberikan dampak negatif signifikan terhadap *preference-giving countries*. Penghapusan tarif memiliki dampak berbeda antar negara. Studi Li dan Carter (2009) dengan Tobit model menemukan bahwa penurunan tarif dan kuota impor untuk negara paling tidak berkembang dapat meningkatkan akses pasar namun relatif kecil. Hal ini dikarenakan proteksi

terhadap beberapa komoditas tidak diikuti dengan peningkatan produksi dan kemampuan ekspor komoditas tersebut dari negara paling tidak berkembang.

Berisha-Krasniqi, et al (2008) menggunakan CGE MIRAGE model yang menunjukkan bahwa pemberian 97% bebas bea masuk hanya memberikan manfaat minimal pada ekspor negara LDC, namun pemberian tersebut berdampak positif bagi peningkatan akses pasar produk pertanian Afrika ke Brazil, Meksiko dan Turki. Pemberian akses 100% bebas bea masuk akan memberikan dampak yang lebih besar karena akan meningkatkan akses pasar dua kali lipat, khususnya pada negara LDC di Asia.

Studi Bouet, et al (2010) menunjukkan bahwa pemberlakuan kebijakan 100% bebas bea masuk bagi LDC akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara tersebut. Perubahan ekspor dan *welfare* positif terjadi pada Malawi sebagai negara eksportir tembakau dan selama ini dikenakan tarif 350% di pasar Amerika. Peningkatan kinerja perdagangan juga terjadi pada negara LDC di Asia Tenggara dari peningkatan ekspor produk tekstil Kamboja ke pasar Amerika. Sebaliknya, Madagaskar merupakan negara yang akan mengalami penurunan ekspor dan kesejahteraan setelah pemberlakuan bebas bea masuk. Dampak kebijakan tersebut akan semakin signifikan jika Brazil, Cina dan India juga mendukung kebijakan ini. Kebijakan ini memberikan dampak yang relatif kecil terhadap kesejahteraan, ekspor dan produksi domestik dari *preference-giving countries*.

Berdasarkan MIRAGE model, Bouet (2008) menunjukkan bahwa

pasar bebas global akan meningkatkan pendapatan nasional LDC sebesar 0,8%. Pembebasan 100% akses pasar untuk LDC akan memberikan peningkatan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan pasar bebas global, khususnya pada Malawi, Asia Tenggara, Bangladesh dan Ethiopia.

Hasil studi dampak penghapusan bebas bea masuk terhadap Malawi oleh Douillet (2012) juga mendapatkan hasil yang sama. Kebijakan ini akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan GDP dan pengentasan kemiskinan di Malawi. Walaupun komoditas tembakau dibudidayakan oleh sebagian besar petani, namun peningkatan akses pasar terutama akan lebih dinikmati oleh petani tembakau skala besar yang memiliki akses pada pasar internasional.

Penurunan tarif multilateral akan menyebabkan perubahan harga dan kinerja perdagangan yang berbeda antar negara berkembang. Penurunan tarif pada Kolombia akan menyebabkan penurunan relatif dalam harga ekspor di sepuluh sektor perdagangan dengan penurunan tertinggi pada kendaraan bermotor dan suku cadang (2,7%). Sebaliknya di Chile, terjadi peningkatan harga khususnya komoditas pangan impor yang rata-rata harganya naik sebesar 4,22%. Hoekman, Ng, and Olarreaga (2002), menyatakan penurunan tarif impor pada produk pertanian di negara berkembang menyebabkan tingkat harga komoditas ini menjadi sangat *volatile*. Kebijakan domestic support diperlukan jika negara berkembang melakukan penurunan tarif untuk menstabilkan tingkat harga domestik.

Biaya pemberian akses pasar bebas bea masuk oleh *preference-giving countries* relatif kecil dibandingkan manfaat yang dirasakan LDC. Elliot (2012) menggunakan CGE model menunjukkan bahwa pemberian akses pasar penuh pada LDC hanya akan mengurangi produksi tekstil Amerika sebesar 0,03%. Pada kasus Selandia baru, analisis CGE dinamis menunjukkan bahwa penghapusan tarif impor memiliki dampak yang sangat kecil terhadap GDP dan efisiensi alokatif pada negara tersebut. Kebijakan tersebut juga dapat menurunkan tingkat *welfare loss* (NZIER Viewpoint, 2010).

Dampak Penghapusan Tarif Terhadap Perekonomian Indonesia

FAO (2004) menyatakan bahwa negara paling tidak berkembang dan negara terbuka kecil pada umumnya adalah eksportir bahan mentah (terutama komoditas pangan), yang memiliki tren harga barang mentah cenderung menurun. Hal ini menyebabkan pendapatan nasional negara-negara tersebut turun. Sebagian besar negara LDC merupakan net *food importers* bahkan banyak yang menghabiskan lebih dari sebagian pendapatan ekspor untuk membeli bahan pangan impor untuk menutupi penurunan produksi pangan domestik.

Kebijakan bebas bea masuk bagi LDC sebaiknya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku murah bagi Industri domestik di negara pemberi fasilitas. Indonesia memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor karena harga bahan baku domestik jauh lebih tinggi dari pada produk

impornya. Hal ini diduga disebabkan buruknya kondisi infrastruktur Indonesia sehingga meningkatkan biaya transportasi dan membuat barang domestik termasuk bahan baku menjadi lebih mahal (Adiningsih et al, 2009).

Salah satu industri yang memiliki ketergantungan impor tinggi terhadap bahan baku adalah industri garmen dan tekstil. Sejak tahun 1980 ketergantungan industri terhadap bahan baku impor bisa mencapai 100%. Ketergantungan tersebut berkurang saat krisis, namun masih tetap tinggi (Robertson et al, 2003). Ketergantungan industri tekstil dan garmen terhadap bahan baku impor dipenuhi oleh Amerika, Eropa dan Vietnam (Drajat, 2008). Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan industri garmen dan tekstil Indonesia masih lambat, ditambah semakin banyaknya negara produsen pesaing (India, Sri Langka dan Bangladesh) serta tingginya impor ilegal (Drajat, 2008). Hermawan (2011) menyatakan penurunan tarif impor garmen hingga 0% akan meningkatkan impor garmen Indonesia sebesar 179,89%, namun meningkatkan produksi garmen Indonesia sebesar 21,95%.

Walaupun terdapat potensi peningkatan impor Indonesia akibat penurunan tarif impor, akan tetapi banyak pihak yang optimis bahwa kenaikan impor bahan baku Indonesia akan menyebabkan produksi industri tekstil dan garmen akan meningkat (*Indotextiles*, 2012). Hal serupa terjadi untuk kasus India, Goldar (2005) menyatakan adanya penurunan tarif impor untuk bahan baku industri tekstil sejak tahun 2000 cenderung mengakibatkan kenaikan impor (bahan baku), namun dikompensasi dengan

peningkatan ekspor produk tekstil sehingga memperkuat posisi India sebagai salah satu eksportir tekstil terbesar di dunia.

Penghapusan tarif impor pada komoditas pertanian yang tidak memiliki keunggulan komparatif dapat memberikan dampak negatif terhadap surplus perdagangan. Studi Haryadi (2010) menyatakan bahwa penghapusan tarif impor pada komoditas pangan seperti padi, gandum, jagung, kedele, gula akan menurunkan ekspor dan sebaliknya meningkatkan kinerja impor. Komoditas yang paling sensitif terhadap penghapusan tarif dan paling turun ekspornya adalah padi (467%). Penurunan ekspor yang besar menunjukkan bahwa komoditas ini kalah bersaing dibandingkan produk impor dari negara lain (Haryadi, 2010). Peningkatan impor setelah penurunan tarif impor juga akan terjadi pada komoditas tanaman sayur dan buah-buahan (Firmansyah, 1998).

Menurut Rachbini (2008), adanya penurunan tarif impor hingga 0% menjadikan kedelai sebagai tanaman pangan yang tidak menguntungkan secara ekonomi untuk dibudidayakan oleh petani. Hal tersebut akan menurunkan produksi domestik dan meningkatkan ketergantungan pada kedelai impor yang membanjiri pasar. Hal serupa juga terjadi pada komoditas jagung yang tidak memiliki keunggulan komparatif namun dibutuhkan sebagai bahan baku industri nasional. Impor jagung akan terus berlangsung dan cenderung terus meningkat seiring dengan penghapusan tarif impor (Siregar dan Suryadi, 2006).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu dua indeks daya saing yaitu *Grubel Lloyd–Intra Industry Trade* dan Spesialisasi Perdagangan, metode uji beda dan model keseimbangan umum GTAP versi 8.

A. Indeks Spesialisasi Perdagangan

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) untuk menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu produk. ISP ini dapat menggambarkan apakah untuk suatu jenis produk, Indonesia cenderung menjadi negara eksportir atau importir. Secara matematika, ISP dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ISP = \frac{(X_{ia} - M_{ia})}{(X_{ia} + M_{ia})}$$

Di mana X dan M masing-masing adalah ekspor dan impor, serta i dan a masing-masing adalah barang jenis i dan negara a. Secara implisit, indeks ini mempertimbangkan sisi permintaan dan sisi penawaran, dimana ekspor identik dengan suplai domestik dan impor adalah permintaan domestik dan selanjutnya ekspor terjadi apabila ada kelebihan atas barang tersebut di pasar domestik.

B. *Intra Industry Trade* (IIT indeks)

Untuk menggambarkan keterkaitan perdagangan kedua negara dilakukan analisis *Intra-Industry Trade* (IIT). IIT indeks digunakan untuk menganalisis tingkat integrasi dalam suatu kawasan tertentu. Integrasi yang tinggi menunjukkan kedekatan perdagangan

diantara negara-negara di kawasan tersebut. IIT indeks yang umum

digunakan adalah Grubel-Lloyd Indeks dengan rumus:

$$IIT = \frac{\sum(X + M) - \sum|X - M|}{\sum(X + M)} \times 100 \text{ atau } 1 - \frac{\sum|X - M|}{\sum(X + M)} \times 100$$

dimana:

X = ekspor M = impor

Nilai Grubel Lloyd indeks berkisar antara 0 sampai 100. Jika jumlah yang diekspor sama dengan jumlah yang diimpor untuk suatu produk, maka indeksnya akan bernilai 100, mengindikasikan kegiatan perdagangan antar industri di kedua negara. Sebaliknya apabila perdagangan suatu negara hanya melibatkan satu pihak saja (ekspor atau impor saja) maka nilai indeksnya adalah 0, yang mengindikasikan tidak adanya

perdagangan timbal balik atau dikenal dengan *interindustry trade*. Data tersebut menggunakan data ekspor dan impor tahun 2006 sampai 2011 yang berasal dari Pusdatin, BPPKP, Kemendag.

C. Uji Beda

Uji beda nilai tengah membandingkan apakah terdapat perbedaan posisi tahap perdagangan dan keterkaitan perdagangan antar Indonesia dan LDC setelah liberalisasi perdagangan.

$$Z = \frac{X - \mu_0}{(S / \sqrt{n})}$$

dimana : Z = Nilai perbedaan yang dicari, X = Nilai rata-rata sampel; μ_0 = Nilai rata-rata populasi, S = Standar deviasi populasi; n = besar sampel.

D. Global Trade Analysis Project (GTAP)

Persamaan dalam model GTAP dalam paper ini berdasarkan pada persamaan yang dapat dilihat dalam *main table* GTAP versi 6, yang dapat dipelajari lebih lanjut dalam Francois, McDonald dan Nordström (1996), Siriwardana (2000), dan Nicita (2005). Selanjutnya data sosial accounting matriks (SAM) GTAP versi 6 diperbaharui dengan

data SAM tahun 2007-2008, dan untuk selanjutnya akan dikenal sebagai GTAP versi 8. Adapun beberapa persamaan yang relevan dengan hasil yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

Trade Balance (DTBAL_i)

Persamaan ini menunjukkan perubahan neraca perdagangan yang disebabkan oleh 1) VXW (i,r): perubahan ekspor, 2) vxwfob (i,r) : perubahan harga FOB, 3) VIW (i,r): perubahan impor berdasarkan harga CIF, 4) Viwcif (i,r) : perubahan harga CIF, dan 5) i, r: negara atau region. Adapun persamaan tersebut dirumuskan dengan:

$$DTBAL_i(i,r) = [VXW(i,r) / 100] * vxwfob(i,r) - [VIW(i,r) / 100] * viwcif(i,r)$$

Kesejahteraan (EV) Persamaan ini menunjukkan perubahan kesejahteraan yang disebabkan oleh: 1) INCOME_{EV}(r): perubahan pendapatan

regional dan 2) yev (r): perubahan pendapatan rumah tangga. Adapun persamaan tersebut dirumuskan dengan:

$$EV(r) = [INCOME_{EV}(r) / 100] * yev(r)$$

Permintaan Tenaga Kerja (qfe)

Persamaan ini menunjukkan perubahan permintaan tenaga kerja yang disebabkan oleh: 1) qfe (i,j,r): perubahan permintaan kepemilikan faktor produksi/bahan baku terkait, 2) afe (i,j,r) : perubahan harga faktor produksi, 3) qva (j,r) : perubahan

permintaan faktor produksi komposit, 4) E_{SUBVA}(j): elastisitas substitusi dari faktor produksi berdasarkan nilai tambah, 5) pfe (i,j,r): perubahan harga dan permintaan faktor produksi domestik dan 6) pva (j,r): perubahan nilai tambah industri. Adapun persamaan tersebut dirumuskan dengan:

$$qfe(i,j,r) = -afe(i,j,r) + qva(j,r) - E_{SUBVA}(j) * [pfe(i,j,r) - afe(i,j,r) - pva(j,r)]$$

Simulasi kebijakan yang digunakan bertujuan untuk melihat dampak pemberian akses pasar bebas tarif dan kuota pada LDC terhadap perekonomian nasional. Adapun dampak liberalisasi tersebut yang dianalisis mencakup dampak liberalisasi terhadap perubahan kesejahteraan, indeks volume dan indeks harga, pendapatan nasional (GDP), perubahan output nasional, perubahan impor, perubahan ekspor dan perubahan surplus perdagangan.

Jepang, Korea, Selandia Baru), dan b) LDC + Mitra FTA. Adapun negara yang dikelompokkan ke dalam LDC adalah Bangladesh, Kamboja, Madagaskar, Malawi, Mauritania, Mozambik, Nepal, Nigeria, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia, dan sisanya dikelompokkan kedalam Afrika Barat Lainnya, Afrika Selatan lainnya, Afrika Tengah, Afrika Tengah Selatan, Afrika Utara Lainnya, Oseania Lainnya, Asia Tenggara Lainnya, dan Karibia.

Data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data perdagangan Indonesia dengan LDC diperoleh dari Statistik Indonesia yang dihasilkan Pusat Data dan Informasi, BPPKP, Kemendag, serta data GTAP khususnya GTAP versi 8. Sektor yang digunakan sesuai dengan standar GTAP versi 8, namun untuk agregasi negara menggunakan dua pengelompokan yaitu a) mitra FTA (ASEAN, Australia, China, India,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Dan Keterkaitan Perdagangan Indonesia Dengan Negara Paling Tidak Berkembang

Tabel 1 menunjukkan kinerja perdagangan Indonesia dengan negara paling tidak berkembang pada periode 2006-2011. Pada tahun 2010, nilai total ekspor Indonesia ke LDC sebesar USD 2.745,73 juta. Tren positif kinerja ekspor Indonesia ke LDC terlihat dari pertumbuhan sebesar 17,32% pada

periode 2006-2010. Pada periode 2010-2011, kinerja ekspor semakin meningkat dengan pertumbuhan 35,01%. Pangsa total ekspor Indonesia ke LDC relatif kecil namun memiliki tren yang meningkat. Pada tahun 2006, pangsa

ekspor Indonesia ke LDC hanya 1,36% dari total ekspor Indonesia ke dunia. Kinerja ekspor semakin meningkat sehingga pada tahun 2011, pangsa ekspor Indonesia ke LDC meningkat menjadi 1,82 %.

Tabel 1. Kinerja Perdagangan Indonesia dan LDC, 2006-2011

Uraian	Nilai (USD Juta)				Jan-Des		Perubahan (%)	Trend (%)
	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2011	11/10 6/10
Total Ekspor Indonesia ke Negara LDC	1.38,55	4.303,90	2.203,20	2.183,66	2.745,73	2.745,73	3.706,99	35,01 17,32
Total Impor Indonesia dari Negara LDC	206,22	325,71	932,46	837,72	429,72	429,72	1.046,53	143,54 22,11
Surplus Perdagangan	1.162,33	3.978,19	1.270,74	1.345,94	2.361,01	2.316,01	2.660,46	14,87 15,31
Total Ekspor Indonesia ke Dunia	100.798,62	114.100,89	137.020,42	116.510,03	157.779,10	157.779,10	203.496,62	28,98 9,6
Total Impor Indonesia dari Dunia	61.065,47	74.473,43	129.197,31	96.829,24	135.663,28	135.663,28	177.435,56	30,79 20,43

Sumber: Pusdatin (2012), diolah

Pada impor, walaupun pangsa total impor Indonesia dari LDC relatif kecil, namun terdapat indikasi peningkatan cukup tajam. Hal tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan *share* impor dari LDC terhadap total impor yaitu 0,03% pada tahun 2006 menjadi 0,77% pada tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa pangsa impor meningkat hampir 23 kali lipat dalam lima tahun terakhir. Peningkatan kinerja impor yang jauh lebih tinggi daripada ekspor perlu menjadi perhatian dalam usulan kebijakan bebas bea masuk bagi LDC.

Surplus perdagangan Indonesia dan LDC meningkat dari USD 1.162,23 juta pada tahun 2006 menjadi USD 2.316,01 juta pada tahun 2010. Terlepas dari pertumbuhan impor yang jauh lebih tinggi dari ekspor, surplus perdagangan Indonesia dan LDC memiliki tren positif yaitu meningkat 15,31% pada periode 2006-2010. Berdasarkan data tersebut, diyakini pemberian fasilitas bebas bea masuk kepada LDC tidak akan merugikan Indonesia mengingat nilai impor Indonesia dari LDC relatif kecil dan Indonesia memiliki surplus perdagangan relatif besar.

Tabel 2. Daya saing dan Keterkaitan Industri LDC dengan Indonesia

HS	Pangsa Impor RI	Akumulasi Impor RI	URAIAN	Indeks IIT (Gruber Lloyd)					Indeks ISP				
				2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
5201000000	43,0%	43,0%	Cotton, not carded/combed.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
2709001000	23,6%	66,7%	Crude petroleum oil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
0713319000	6,7%	73,4%	Beans (vigna mungo hepper/vigna radiata wilczek), dried, other than for sowing	0,69	0,00	0,00	0,05	0,05	0,31	1,00	-1,00	-0,95	-0,95
7204490000	2,9%	76,3%	Other ferrous waste and scrap :	0,00	0,00	NA	0,20	0,02	1,00	1,00	NA	-0,80	-0,98
1801000000	2,8%	79,1%	Cocoa beans, whole or broken,raw/roasted	0,00	NA	NA	NA	0,00	-1,00	NA	NA	NA	1,00
6305101100	2,7%	81,9%	Sack&bag,oth bast fibr head 5303, new,of jute	NA	NA	NA	0,00	0,00	NA	NA	NA	-1,00	-1,00
5307200000	1,5%	83,4%	Multiple (folded)/cabled of jute/ oth fibres bast fibres of heading 53.03.	0,00	0,00	0,00	0,75	0,01	-1,00	1,00	1,00	0,25	-0,99
8901902400	1,4%	84,8%	Other vessels, motorised of gross tonnage > 500 but <= 4000 ton	NA	NA	NA	NA	0,00	NA	NA	NA	NA	1,00
1202200000	1,1%	85,9%	Ground nuts, shelled	NA	NA	NA	0,16	NA	NA	NA	NA	-0,84	NA
7404000000	1,1%	86,9%	Copper waste and scrap.	0,06	0,00	0,37	0,00	0,88	-0,94	-1,00	0,63	-1,00	0,12
2710117000	1,0%	87,9%	Naphtha, reformate or preparations for preparing spirits	0,68	0,84	0,56	0,30	0,34	0,32	-0,16	-0,44	-0,70	-0,66
8802401000	0,9%	88,8%	Aeroplanes of an unladen weight > 15,000 kg	0,00	NA	NA	NA	NA	-1,00	NA	NA	NA	NA
3301291900	0,9%	89,7%	Oth pharmaceutical grade-essential oils oth than those of citronella	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1202109000	0,8%	90,5%	Oth ground nuts, not roasted/otherwise cooked, in shell	0,00	0,00	0,00	0,03	0,33	1,00	1,00	1,00	0,97	0,67

Sumber: Hasil Perhitungan (2012)

Keterangan :

- Gruber Lloyd atau disebut juga Intra Industry Trade, dengan nilai 0 – 1. Nilai 1 berarti produk tersebut terkait dengan indutri nasional, nilai 0 sebaliknya. Rumusnya : $1 - \frac{[X-M]}{X+M}$. X = ekspor produk, M = impor produk, [X-M] : harga mutlak X-M.
- Indeks Spesialisasi Perdagangan, dengan nilai -1 sampai 1. Nilai -1 menunjukkan produk bernilai tambah rendah (bahan baku), sedangkan nilai 1 menunjukkan bernilai tambah tinggi (konsumsi). Rumusnya : $\frac{X-M}{X+M}$, X = ekspor produk, M = impor produk.
- Merah diusulkan untuk tidak diliberalisasi kecuali sektor tidak keberatan.

Pemberian akses pasar bagi LDC oleh Indonesia akan berdampak positif jika didukung daya saing produk yang tinggi dan memiliki keterkaitan dengan industri nasional. Tabel 2 memperlihatkan, total impor Indonesia dari negara-negara LDC mencapai USD 1.046,53 juta, ternyata 43% dari impor tersebut merupakan produk katun (*cotton*), 23,6% merupakan minyak mentah (*Crude petroleum oil*), 6,7% merupakan bijian (*Beans*), 2,9% merupakan limbah dan potongan besi (*other ferrous waste and scrap*), 2,8% merupakan biji coklat (*Cocoa beans*), 2,7% merupakan karung (*sack and back of jute*), 1,5% merupakan benang untuk karung (*multiple cable of jute*), 1,4%

merupakan kapal bertonase antara 500 sampai 4.000 ton (*Other vassel, motorised of gross tonage > 500 but ≤ 4.000 ton*), 1,1% terdiri dari kacang tanah (*ground nut*), 1,1% terdiri dari limbah dan potongan tembaga (*cooper waste and scrap*), serta 1% terdiri dari Naptha. Akumulasi total impor dari kesebelas produk tersebut mencapai 87,8% dari total impor Indonesia atas seluruh produk negara-negara LDC. Adapun produk yang masih dikenakan tarif dari kesebelas produk tersebut adalah bijian sebesar 5%, limbah dan potongan besi sebesar 5% serta biji coklat sebesar 5%.

Selanjutnya Tabel 2 memperlihatkan daya saing dan keterkaitan produk dengan industri antara Indonesia

dan LDC masih rendah. Nilai indeks yang mendekati nol mengindikasikan perdagangan antara Indonesia dengan LDC masih merupakan *inter-industry trade*, atau perdagangan antar industri di Indonesia dengan negara-negara LDC tanpa saling meningkatkan nilai tambah (Grubel and Lloyd, 1971). Hasil perhitungan menunjukkan Indonesia memiliki keterkaitan industri rata-rata sebesar 0,14 pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 0,15 pada tahun 2010.

Nilai Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) sebesar -0,34 pada tahun 2006 dan -0,35 pada tahun 2010, mengindikasikan produk dari industri nasional tidak mampu bersaing dengan produk impor dari negara-negara LDC (Kementerian Perdagangan, 2008). Sebenarnya hal ini bermanfaat bagi industri pengolahan karena

mereka memperoleh akses bahan baku. Namun rendahnya daya saing tersebut menjadi salah satu kendala dan pertimbangan dalam pemberian bebas bea masuk untuk produk dari LDC di pasar Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji beda ISP dan IIT (Tabel 3), terlihat bahwa daya saing dan keterkaitan dengan industri domestik Indonesia dan LDC tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang tidak signifikan tersebut mengindikasikan pola perdagangan dan produk yang diperdagangkan antara Indonesia dengan LDC dalam kurun waktu lima tahun terakhir relatif tidak berubah. Berdasarkan hal ini, diyakini pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk diduga berdampak relatif kecil terhadap perekonomian dan kinerja perdagangan di Indonesia.

Tabel 3. Uji Beda ISP dan IIT

No	Uraian	ISP		IIT	
		Means	Prob	Means	Prob
1	Cotton, not carded/combed.	1,50 0,00	0,15	0,00 0,00	1,00
2	Crude petroleum oil	0,00 0,00	1,00	0,00 0,00	1,00
3	Beans (vigna mungo hepper/vigna radiata wilczek), dried, other than for sowing	2,00 1,00	0,65	2,00 1,00	0,65
4	Other ferrous waste and scrap :	0,00 1,50	0,18	0,00 1,50	0,18
5	Cocoa beans, whole or broken, raw/roasted	-	-	-	-
6	Sack&bag, oth bast fibr head 5303, new, of jute	-	-	-	-
7	Multiple (folded)/cabled of jute/ oth fibres bast fibres of heading	2,00 1,00	0,65	0,00 1,50	0,18
8	Other vessels, motorised of gross tonnage > 500 but <= 4000 ton	-	-	-	-
9	Ground nuts, shelled	-	-	-	-
10	Copper waste and scrap.	1,00 2,00	0,65	1,00 2,00	0,65

Sumber: Hasil Perhitungan (2012)

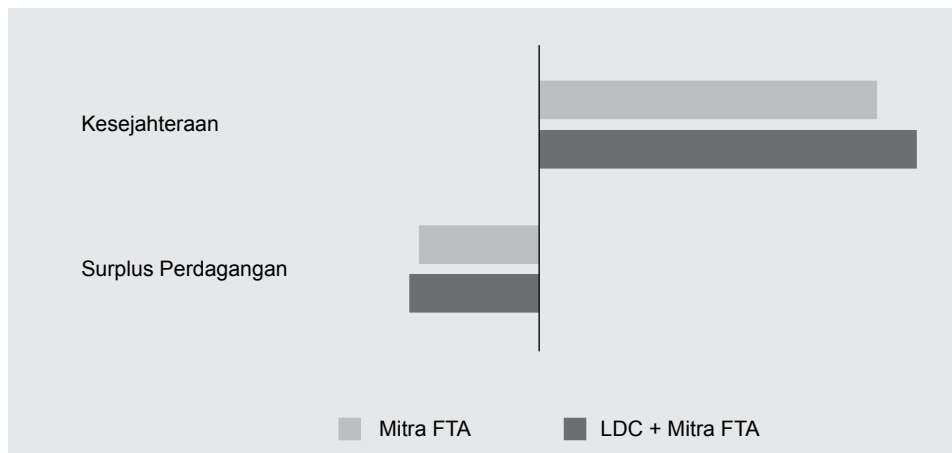
Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bebas Bea Masuk bagi Indonesia

Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bebas Bea Masuk terhadap Ekonomi Makro

Simulasi pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk terhadap ekonomi makro Indonesia relatif kecil. Hal tersebut mengingat bahwa sebagian negara LDC termasuk dalam anggota ASEAN dan telah melakukan liberalisasi dengan Indonesia (Myanmar, Kamboja). Penghapusan kuota dan tarif tidak memberikan dampak signifikan bagi

perekonomian makro Indonesia (GDP, harga), walaupun terdapat tendensi penurunan surplus perdagangan (Gambar 4).

Pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk menyebabkan penurunan kinerja perdagangan namun dikompensasi dengan peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut sejalan dengan temuan pada kasus negara Selandia Baru dimana penghapusan tarif berdampak relatif kecil terhadap perekonomian makro, namun mampu menurunkan tingkat welfare loss (NZIER *Viewpoint*, 2010).



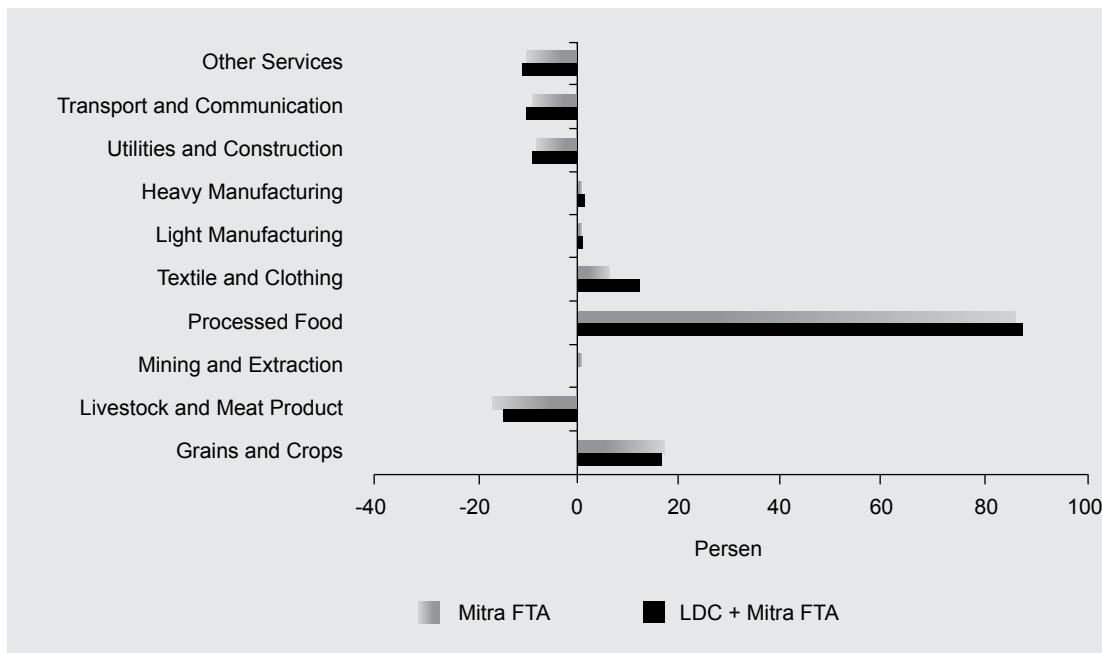
Gambar 4. Dampak Pemberlakuan Bebas Bea Masuk pada LDC terhadap Perekonomian Makro Indonesia

Sumber: Hasil simulasi (2012)

Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bebas Bea Masuk terhadap Kinerja Ekspor Nasional

Dampak pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia, khususnya setelah liberalisasi perdagangan berjalan (Gambar 5).

Hal tersebut mengingat bahwa *share* ekspor Indonesia ke LDC sangat kecil walaupun memiliki tren yang semakin meningkat. Selama periode 2006-2010, pertumbuhan ekspor sebesar 17,32% namun *share* ekspor ke LDC terhadap total ekspor Indonesia hanya sebesar 1,36% pada tahun 2006 dan 1,82% pada tahun 2010 (Tabel 1).



Gambar 5. Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bebas Bea Masuk Terhadap Kinerja Ekspor Nasional

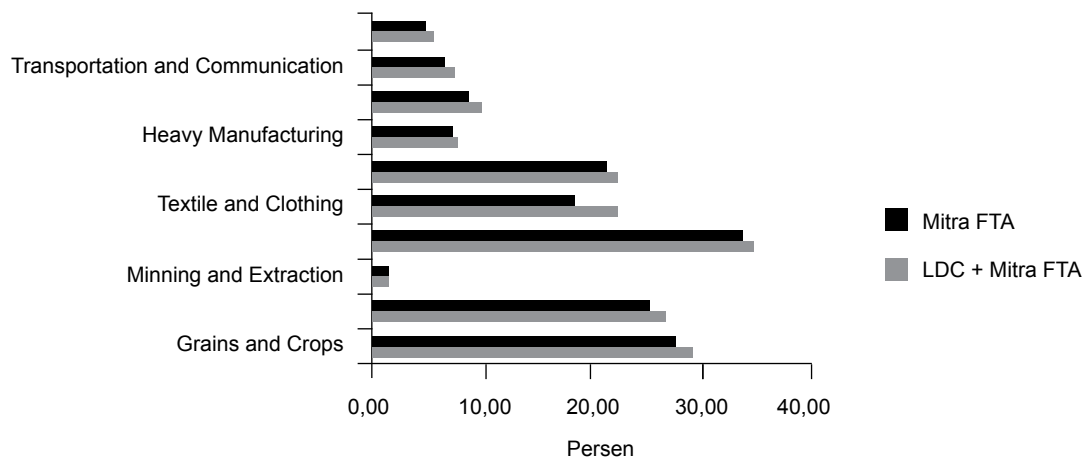
Sumber: Hasil simulasi (2012)

Secara sektoral, pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk akan meningkatkan kinerja ekspor nasional untuk tanaman pangan, produk pertanian lain khususnya makanan olahan, serta tekstil dan produk tekstil. Selain itu, peluang peningkatan ekspor Indonesia masih mungkin meningkat lebih tinggi mengingat sebagian besar negara LDC merupakan eksportir barang mentah namun *net food importers*. Pendapatan dari ekspor barang mentah LDC digunakan untuk membeli bahan pangan impor untuk menutupi kelebihan permintaan akibat penurunan produksi pangan domestik (FAO, 2004). Contohnya pada kasus Madagaskar, penurunan tarif impor menyebabkan peningkatan impor akibat membanjirnya barang impor dari Eropa (Hallaert, 2008). Indonesia dapat meminimalkan penurunan surplus perdagangan dengan meningkatkan ekspor makanan olahan

serta tekstil dan produk tekstil pada LDC.

Dampak Pemberlakuan Bebas Bea Masuk terhadap Kinerja Impor Nasional

Gambar 6 menunjukkan bahwa kinerja impor nasional sejak liberalisasi mengalami peningkatan diseluruh kelompok barang. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan akan meningkatkan impor yang mengakibatkan penurunan neraca perdagangan pada negara yang memiliki kesiapandandayasaingprodukyanglebih rendah (Park et.al, 2008). Pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk pada LDC tidak signifikan merubah kinerja impor nasional dibandingkan pasca liberalisasi dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan rendahnya *share* impor Indonesia terhadap LDC (0,03% pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 0,77% pada tahun 2011).



Gambar 6. Dampak Pemberlakuan Bebas Bea Masuk terhadap Kinerja Impor Nasional

Sumber: Hasil simulasi (2012)

Peningkatan impor pangan meningkat lebih tinggi daripada sektor lainnya pasca liberalisasi, yaitu makanan olahan, ternak dan produk olahannya, serta biji-bijian dan tanaman pangan. Hal tersebut menunjukkan ketergantungan pangan nasional terhadap impor semakin meningkat sebagai dampak liberalisasi dan pemberlakuan bebas tarif dan kuota dari LDC. Penurunan tarif impor akan meningkatkan impor pada komoditas pertanian yang tidak memiliki keunggulan komparatif, seperti jagung, kedelai, dan

hortikultura (Haryadi, 2010; Rachbini, 2008; Siregar dan Suryadi, 2006 dan Firmansyah, 1998).

Usulan Pemberlakuan Bebas Bea Masuk terhadap LDC

Usulan dalam deklarasi G-20 tahun 2011 adalah memberikan akses pasar terhadap 97% dari total pos tarif atau volume impor negara bersangkutan terhadap impor dari LDC, namun bagi negara berkembang sebagaimana halnya Indonesia, masih memiliki fleksibilitas.

Tabel 4. Tarif Impor MFN Indonesia dan Pangsa Impor dari LDC

Deskripsi	Pos Tarif	Pangsa Impor
Total Pos Tarif Impor	1.598	
A. Tarif MFN 0%	217	51,20%
IIT \geq 0.7	11	0,01%
ISP \leq 0.3	60	50,00%
B. Tarif MFN 5%	755	46,30%
IIT \geq 0.7	23	0,001%
ISP \leq 0.3	163	8,50%
C. Tarif MFN 7.5-10%	286	1,00%
IIT \geq 0.7	6	0,00%
ISP \leq 0.3	53	0,10%
D. Tarif MFN \geq 12.5% dan Spesifik	340	1,50%
IIT \geq 0.7	6	0,00%
ISP \leq 0.3	64	0,00%

Sumber: Hasil Perhitungan (2012)

Keterangan :

IIT \geq 0.7 : keterkaitan dengan kinerja perdagangan industri nasional tinggi

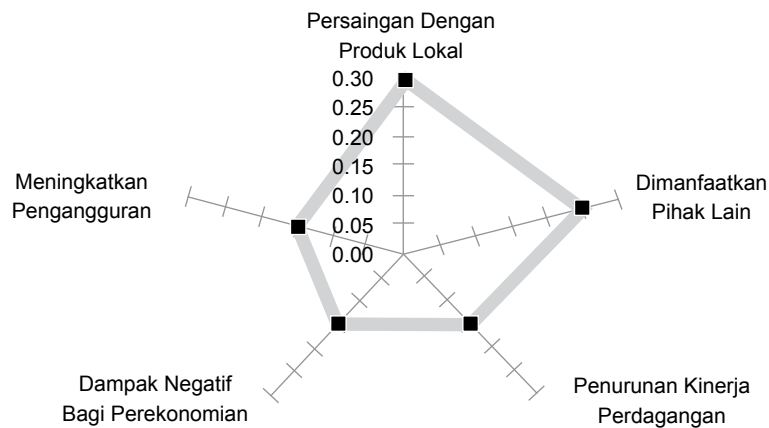
ISP \leq 0.3 : produk impor bernilai tambah rendah / bahan baku bagi industri nasional

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar impor Indonesia dari LDC telah dikenakan tarif yang rendah (MFN 0% dan 5%), khususnya pada produk dengan nilai tambah rendah sebagai bahan baku industri nasional. Jumlah produk impor Indonesia dari LDC mencakup 1.598 pos tarif, yang terdiri dari 217 pos tarif dengan MFN 0%, 755 pos tarif dengan MFN 5%, 286 pos tarif dengan MFN 7,5-10% dan 340 pos tarif dengan MFN minimal 12.5% serta tarif spesifik.

Sesuai dengan klausul fleksibilitas bagi negara berkembang, akses pasar minimal yang dapat diberikan Indonesia bagi LDC adalah sebesar 70% dari total pos tarif atau pangsa impor. Adapun total pos tarif Indonesia adalah 10.012 pos tarif, berdasarkan Buku Tarif dan Bea Masuk Indonesia 2012. Oleh karenanya, Indonesia masih dapat memilih untuk tidak meliberalisasikan 3.003 pos tarif

yang diantaranya dapat memuat 755 pos tarif dengan bea masuk sebesar 5% yang banyak diimpor dari negara-negara LDC dan mungkin bersaing dengan produk domestik. Adapun produk negara-negara LDC yang dikhawatirkan akan bersaing dengan produk domestik adalah biji coklat.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelaslah bahwa pemberian fasilitas bebas bea masuk bagi produk yang berasal dari negara LDC tidak akan merugikan Indonesia bahkan diproyeksikan meningkatkan kinerja ekspor makanan olahan nasional. Hal ini disebabkan masih sedikitnya produk yang diimpor Indonesia dari LDC, produk yang diimpor umumnya bahan baku, dan klausul fleksibilitas yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan terbaik bagi produk domestik.



Gambar 7. Peta Permasalahan Pemberlakuan Kebijakan Bebas Bea Masuk

Sumber: Puska KPI, (2012)

Selanjutnya, dalam upaya merumuskan kebijakan pemberian fasilitas bebas bea masuk yang tepat, dilakukan kegiatan *Focus Group Discussion* dengan pelaku usaha dan instansi terkait. Gambar 7 menunjukkan

bahwa *stakeholder* terkait memiliki kekhawatiran kebijakan bebas bea masuk bagi LDC akan dimanfaatkan oleh negara ketiga. Untuk mencegah hal tersebut, pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk bagi LDC harus

disertai dengan aturan *rules of origin* yang ketat (*local content* 40%).

Hal kedua yang perlu mendapat perhatian adalah persaingan dengan produk domestik. Penghapusan tarif dan kuota impor untuk biji kakao dan produk olahannya dapat mempengaruhi kesejahteraan petani coklat nasional. Artinya kebijakan bebas bea masuk dapat dipertimbangkan lagi untuk komoditas yang memiliki *share* impor tinggi dan dapat dipenuhi dari produksi domestik.

Pemfokusan tujuan pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk bagi LDC untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri sangat didukung oleh seluruh *stakeholder*. Hal itu akan mengantisipasi dampak negatif pemberlakuan kebijakan bebas bea masuk terhadap perekonomian nasional berupa pengurangan kesempatan kerja dan penurunan kinerja perdagangan relatif kecil.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Total ekspor Indonesia ke LDC (48 negara) pada tahun 2010 sebesar USD 2.745,73 juta dengan pertumbuhan 17,32% selama 2006-2010. Sedangkan total impor Indonesia dari LDC pada tahun 2010 mencapai USD 429,72 juta, yang terdiri dari 43,0% berupa katun (dengan tarif 0%), 23,6% minyak bumi (tarif 0%), 6,9% bijian (tarif 5%), 2,9% limbah besi (tarif 5%) dan 2,8% biji coklat (tarif 5%). Pangsa impor kelima produk tersebut mencapai 79,1% dari total impor atas produk LDC. Surplus perdagangan pada tahun 2010 sebesar USD 2,6 miliar dan tumbuh 15,31% selama 2006-2010.

Daya saing dan keterkaitan industri LDC dengan Indonesia masih rendah, dimana sebagian besar produk impor dari negara tersebut merupakan bahan baku bagi industri nasional. Selanjutnya, hasil simulasi memprediksikan dampak bebas bea masuk akan meningkatkan kinerja impor, mengurangi surplus perdagangan, namun dikompensasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas bebas bea masuk sebaiknya ditujukan untuk memberikan akses bahan baku murah bagi industri nasional.

Total pos tarif Indonesia di tahun 2012 adalah 10.012 pos tarif, dimana Indonesia memiliki fleksibilitas untuk tidak meliberalisasikan 30% atau 3.003 pos tarif yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi produk domestik yang bersaing dengan produk dari negara LDC. Klausula fleksibilitas tersebut memberikan kemudahan bagi Indonesia untuk melindungi produk domestik mengingat total pos tarif yang diimpor dari negara-negara LDC hanya 1.598 pos tarif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar pemberian fasilitas bebas bea masuk harus bertujuan untuk meningkatkan akses bahan baku murah yang dilakukan dengan pemberlakuan ketentuan *Rules of Origin* (Surat Keterangan Asal) yang ketat. Pemberlakuan ketentuan khusus (*Product Specific Rules/PSR*) untuk produk tertentu dilakukan bertahap, dan harus memaksimalkan fleksibilitas sebagai negara berkembang dengan mengecualikan produk impor utama dari negara LDC.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, S., et al. (2009). *Sustainable Development Impacts of Investment Incentives: A Case Study of the Chemical Industry in Indonesia*. International Institute for Sustainable Development.
- Berisha-Krasniqi, V., et al. (2008). The Development Promise: Can the Doha Development Agenda Deliver for Least-Developed Countries? *IFPRI Note 14*: Washington, DC. IFRI.
- Bouet, A., et al. (2010). The Costs and Benefits of Duty-Free, Quota-Free Market Access for Poor Countries. Who and What Matters? *IFPRI Discussion Paper 00990*: Washington, DC. Markets, Trade and Institutions Division, IFPRI.
- Bouet, A. (2008). The Expected Benefits from Trade Liberalization-Opening The Black Box of Global Trade Modelling. *IFPRI Food Policy Review 8*: Washington, DC. IFRI.
- Drajat, U.A. (2008). *Unveiling Protectionism: Regional Responses to Remaining Barriers in the Textiles and Clothing Trade*. UNESCAP.
- Douillet, M. (2012). Trade and Agricultural Policies in Malawi: Not All Policy Reform is Equally Good for the Poor. *MPRA Paper No. 40948*. Munich Personal RePEc Archive.
- Elliot, K. (2012). *Breaking the Deadlock on Market Access for Least Developed Countries dalam The Future and the WTO: Confronting the Challenges* diedit oleh Ricardo Melendez-Ortiz, Christophe Belimann, dan Miquel Rodriguez Mendoza: Geneva. International Centre for Trade and Sustainable Development.
- FAO. (2004). *The State of Agricultural Commodity Markets*. Roma
- Puska KPI. (2012). Kegiatan Focus Group Discussion Pelaksanaan Pemberian Bebas Bea Masuk dan Bebas Kuota Bagi Negara LDC, Dilaksanakan di Hotel Akmani, Jakarta, 8 November 2012.
- Firmansyah. (1998). *Prospek Komoditas Sayuran dan Buah-Buahan*. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Francois, J.F., B. J. McDonald dan H. Nordström. (1996). *Liberalization and Capital Accumulation in the GTAP Mode*. GTAP Technical Paper No. 7.
- Goldar, B. (2005). *Impact on India of Tariff and Quantitative Restriction under WTO*. Indian Working Paper No.172. Council for Research on International Economic Relations.
- Grubel, H.G., and P.J. Lloyd. (1971). The Empirical Measurement of Intra Industry Trade. *Economic Record 47 (4)*. Diunduh melalui <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4932.1971.tb00772.abstract> ; jsessionid=2519A12909190B3C398BA85821D61FB6.d01t3, pada 20 Juni 2012.
- Hallaert, J.J. (2008). How does a domestic tax reform affect protection against imports?. IMF Working Paper. WP/08/151.
- Haryadi. (2010). *Dampak Penghapusan Tarif Oleh Negara-Negara Anggota WTO terhadap Permintaan Tenaga Kerja di Indonesia*. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi
- Hermawan, I. (2011). Analisis Dampak Kebijakan Makroekonomi Terhadap Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Bank Indonesia.
- Hoekman, B., F. Ng, M. Olarreaga. (2002). *Reducing Agricultural Tariffs versus Domestic Support: What's More Important for Developing Countries?*. World Bank Policy Research Working Paper 2918.
- Indotextiles. (2012). *Import of Raw Materials Continue to Rise*. [online]. http://www.indotextiles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2285&Itemid=72. (diakses 14 Agustus 2012).

- Kementerian Perdagangan. (2008). *Indeks Spesialisasi Perdagangan*. Diunduh melalui <http://www.kemendag.go.id>, pada 20 Juni 2012.
- Li, X.L. and C.A., Carter. (2009). The Impact of Tariff-Rate Import Quotas on Market Access. Davis : *Department University of California*.
- Nicita, A. (2005). Multilateral Trade Liberalization and Mexican Households: The Effect of the Doha Development Agenda dalam *Putting Development Back into the Doha Agenda: Poverty Impacts of a WTO Agreement*, Thomas W. Hertel and L. Alan Winters (ed). Washington, DC: World Bank.
- NZIER Viewpoint. (2010). The economic impacts of retaining tariffs in New Zealand: A dynamic CGE analysis. *Working Paper 2010/1*.
- Park, D., et al. (2008). Prospects of an ASEAN–People’s Republic of China Free Trade Area: A Qualitative and Quantitative Analysis. *Economics Working Paper Series No. 30*, Asian Development Bank.
- Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). (2012). *Neraca Perdagangan Indonesia*: Jakarta. Kementerian Perdagangan.
- Rachbini, D. J. (2008). *Hancurnya Sistem Pertanian Kedelai*. Diunduh melalui <http://www.nabble.com/-sastra-pembebasan--Hancurnya-Sistem -Produksi Kedelai-td14988452.html>, pada 14 Agustus 2012.
- Robertson, R., S. et al. (2003). *Globalization and Working Conditions: Evidence from Indonesia*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Siregar, M. dan S. Suryadi. (2006). Enhancing Sustainable Development of Diverse Agriculture In Indonesia. *CAPSA Working Paper No. 97* (UNESCAP).
- Siriwardana, M. (2000). Effects of Trade Liberalization in South Asia With Special Reference to Srilanka (paper). Dipresentasikan pada Third Annual Conference on Global Economic Analysis, Monash University, Melbourne, Australia, 23-30 Juni
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Internasional*. Edisi Kelima. Penerjemah Haris Munandar: Jakarta. Penerbit Erlangga.
- United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2012). *Research and Policy Analysis on LDCs*. Geneve. Diunduh tanggal 20 Juni 2013 dari [http://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least %20Developed %20Countries/Research-and-Policy-Analysis-on-LDCs.aspx](http://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/Research-and-Policy-Analysis-on-LDCs.aspx)